

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 KELUAR DARI BINGKAI KONTESTASI ‘GEREJA VS. NEGARA’: MENCARI MODEL RELASI AGAMA DAN NEGARA.....	1
1. Politik Wacana: Membongkar dan Mengonstruksi Wacana	7
2. Saleh Dalam ‘Gereja Tidak Berpolitik’	9
3. Artikulasi Kesalehan Secara Politis	19
4. Urgensi Membingkai Ulang Pewacanaan: Kesalehan Politik Gereja Dalam Insulasi.....	28
5. Pertanyaan Penelitian	36
6. Tujuan penelitian.....	36
7. Literature Review.....	37
7.a. Reframing Model Relasi Agama dan Negara	39
7.b. Mengartikulasi Kesalehan, Memperlakukan Jemaat Sebagai Warga Negara Yang Berdemokrasi	57
7.c. Insulasi Wacana Kesalehan Warga Negara, Koreksi Terhadap Dislokasi Wacana	64
8. Kerangka Analisis: Layanan Kemanusiaan Menjadi Titik Damai Hubungan Gereja dan Negara.....	68
8.a. Skema Teoritik Wacana Politik Insulasi Kesalehan.....	73
9. Catatan Metodologis.....	74
10. Lanskap Pembahasan.....	76
BAGIAN PERTAMA: PROSEDUR PRODUKSI POLITIK WACANA ‘MILAJARRA’	82
BAB 2 <i>SPACE-MAKING</i>: INSTITUSIONALISASI KEKUASAAN TUHAN DI MUKA BUMI INDONESIA.....	84

1. Mengelola <i>Co-inhabitasi</i> Gereja dan Negara Secara Insulatif	85
2. Ruang Pewacanaan.....	92
3. Praktik Sosial: Reproduksi Komitmen Etik.....	102
3.a. Wacana Kekuasaan Tuhan dan PenyejarahanNya	103
3.b. Reformasi: Dislokasi Reproduksi Jalinan Kuasa Wacana Pemerintahan Allah Dengan Wacana Negara Bangsa	106
3.c. Negara Bangsa dan Jejak Sejarahnya	109
3.d. <i>Space Making (1)</i> : Reproduksi Wacana Negara Bangsa Republik Indonesia.....	113
3.e. <i>Space Making (2)</i> : Persilangan Artikulasi Wacana.....	119
4. Strategi Artikulasi Ke-Kristenan Dalam Negara Bangsa Indonesia.....	127
BAB 3 WACANA HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA: MODELLING SECARA INSULATIF.....	131
1. Alur Transformasi Pewacanaan Hubungan GKS Dengan Pemerintah Daerah: Melacak dan Merekonstruksi Wacana	132
2. Demokrasi: Titik Temu Praktik ' <i>Production of Space</i> ' Agama dan Negara	138
3. Corak Wacana Kesalehan Dalam Berdemokrasi.....	142
3.a. Sistem Yang Stabil.....	148
3.b. Keterlibatan Aktif Warga Negara Yang Sekaligus Jemaat.....	149
3.c. Menghormati Hak Asasi Manusia.....	151
3.d. Menghormati Kesetaraan.....	152
3.e. Penegasan Kebebasan.....	152
3.f. Saling Menghormati	153
4. Melacak Praktik Wacana Insulasi: Reframing Wacana.....	154
BAB 4 JEJAK SOSIOLOGIS ARTIKULASI POLITIK.....	157
INSULASI KESALEHAN GKS.....	157
1. Historiografi Politik Kesalehan.....	159
1.a. Jalur Pendidikan.....	164
1.b. Jalur Penyehatan.....	169

1.c. Jalur Pemberdayaan Ekonomi Jemaat	173
1.d. Jalur Mitigasi dan Penanggulangan Wabah dan Bencana Alam.....	179
1.e. Jalur Demokrasi: GKS Masih Gagap.....	182
2. Meneruskan Warisan Politik Kesalehan: Alasan Bersekutu	187
3. Di Balik Persektuan Pembebasan: Praktik Politik Tanpa Kata Politik.....	193

BAB 5 POLITIK WACANA ‘MILAJARRA’: INSULATOR WACANA BERJEMAAT, BERBUDAYA DAN BERWARGA NEGARA DI SUMBA..... 200

1. Sinergitas Wacana ‘Milajarra’, Negara Bangsa dan Pemerintahan Allah	201
2. Konstruksi Politik Wacana ‘Milajarra’, Sebagai Politik Wacana Insulasi GKS.....	204
3. Politik Wacana ‘Milajarra’: Rujukan Berjemaat, Berbudaya dan Berwarga Negara Di Sumba	209
3.a. Re-artikulasi ‘Gereja Tidak Berpolitik’	212
3.b. Re-artikulasi: Jemaat Makin Memerlukan Gereja Untuk Berpolitik	217
3.c. Re-artikulasi: Mengintensifkan Pembahasan Tentang Kewarganegaraan	219
3.d. Re-artikulasi: Mengintensifkan Kemitraan GKS Dengan Pemerintah Daerah.....	224
3.e. Reartikulasi: Pemilu Adalah Mandat Tuhan.....	227
3.f. Re-artikulasi: Pendeta Bisa Bertarung Adu Bersih Dalam Pemilihan Umum.....	237
3.g. Re-artikulasi: Gereja Bukan Lembaga Politik Negara, Namun Politik Etis Gereja Didambakan.....	241
4. Politik Wacana ‘Milajarra’: Model Keterlibatan Gereja Dalam Ruang Publik Negara	243

BAGIAN KEDUA: KAUM ‘MILAJARRA’: RUANG AKSI KEBERPIHAKAN GKS, PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA ADAT 249

BAB 6 LAYANAN PEMBEBASAN GKS TERHADAP KAUM	
‘MILAJARRA’: PERLU DITINGKATKAN	254
1. Pembebasan Kaum ‘ <i>Milajarra</i> ’: Agenda Aksi Keberpihakan GKS, Melanjutkan Yang Sudah Dijalankan	255
2. Secara Sosiologis Gereja Adalah Lembaga Politik: Keluar Dari Kepalsuan Wacana Gereja Bukan Lembaga Politik	261
3. Negara Bagian Integral Dari Gereja: Keluar Dari Wacana Negara Bukan Bagian Dari Gereja	262
4. Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Pendeta dan Jemaat	264
5. Perlunya Pengembangan Struktur Organisasi GKS	266
BAB 7 PEMILIHAN UMUM: SIMULASI KEDAULATAN	
JEMAAT SELAKU WARGA NEGARA	267
1. Pertaruhan Kesalehan Publik	268
2. Menentukan Keadaban dan Kesejahteraan Bangsa	270
3. Mengelola Cita Kepublikan Dalam Afiliasi Ganda	279
4. Cita Kewarganegaraan Jemaat GKS	281
4.a. Pemilihan Umum Sejalan Dengan Kesalehan Etis Kristen	282
4.b. Orang Kristen Wajib Mengimplementasikan Nilai-Nilai Luhur Demokrasi Dalam Pemilihan Umum	285
4.c. Pemilu Bukan Ruang Adu Banyak Pendukung	295
4.d. Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Jemaat	299
5. Mendambakan Cita Kepublikan dan Kesalehan Kristen	301
BAB 8 KOLABORASI ‘MILAJARRA’: GKS, PEMERINTAH	
DAERAH DAN LEMBAGA ADAT DI SUMBA	304
1. Urgensi Keberpihakan GKS, Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Kepada Kaum ‘ <i>Milajarra</i> ’ Di Sumba	306
2. Prinsip Kolaborasi GKS Dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Di Sumba	308
3. Institusi GKS, Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Adalah Agen Politik Wacana ‘ <i>Milajarra</i> ’	311



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Politik Wacana Milajarra: Model Insulatif Hubungan Gereja dan Negara Di Sumba
Lasarus Uumbu Labu Pinyawali, Profesor Purwo Santoso, Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BAGIAN KETIGA.....	314
BAB 9 PENUTUP: KESIMPULAN DAN SIGNIFIKANSI	316
1. Kesimpulan	316
2. Signifikasi	325
BIBLIOGRAFI	332
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	345